

**VALIDITAS HUKUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM PENGATURAN
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Nama: Akhmad Hidayat
Jurusan/Program Studi: Magister Ilmu Hukum
Pembimbing: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.**

ABSTRAK

Saat ini, terdapat dua Peraturan Menteri yang berlaku dan mengatur pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Materi muatan kedua peraturan tersebut saling tumpang tindih dan norma hukumnya saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan *type* penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah validitas hukum kedua peraturan tersebut dengan menggunakan teori kewenangan pemerintah, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori validitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah dibentuk oleh pejabat yang sedang tidak memperoleh kewenangan mengatur pembangunan Desa pada saat peraturan tersebut ditetapkan. Oleh karenanya peraturan tersebut tidak valid, dapat dituntut batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada, dan segala akibatnya batal demi hukum. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 telah dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi sehingga merupakan peraturan yang valid atau sah secara hukum, dapat berlaku atau diberlakukan sebagai norma hukum yang mengikat untuk umum.

Kata kunci: Validitas Hukum, Peraturan Menteri, Pembangunan Desa

**VALIDITAS HUKUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM PENGATURAN
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Name: Akhmad Hidayat

Dicipline/Study Programme: Master of Law

Contributor: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

ABSTRACT

Currently, there are two Ministerial Regulations in effect that govern the general guidelines for village development implementation, namely the Ministry of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development and the Ministry of Village, Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation Number 21 of 2020 regarding General Guidelines for Village Development and Empowerment of Village Communities. The content of both regulations overlaps and their legal norms contradict each other, leading to legal uncertainty. This study is a type of legal research with a statute approach and a conceptual approach that examines the legal validity of both regulations using the theory of government authority, the theory of legislative formation, and the theory of legal validity. The results of the study indicate that the Ministry of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 was formed in accordance with higher legal regulations. However, the regulation was established by officials who did not have the authority to regulate village development at the time the regulation was enacted. Therefore, this regulation is not valid, can be claimed to be void by law, is considered never to have existed, and all its consequences are null and void by law. On the other hand, the Ministry of Village, Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation Number 21 of 2020 was formed in accordance with higher legal regulations, thus it is a valid or legally established regulation that can be applied or enforced as a binding legal norm for the public.

Keywords: Legal Validity, Ministerial Regulation, Village Development